

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1.1 Kesimpulan

Trias Politika, sebagai prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis, menggarisbawahi pentingnya pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama dari pemisahan ini adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan di satu tangan, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan dan tirani. Sebaliknya, dengan membagi kekuasaan, tercipta sistem *checks and balances* yang saling mengawasi dan mengimbangi, sehingga meminimalkan risiko otoritarianisme dan memastikan akuntabilitas pemerintahan. Di Indonesia, konsep Trias Politika telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan perjalanan sejarah politik dan ketatanegaraan. Meskipun tidak dianut secara absolut seperti dalam beberapa sistem pemerintahan lainnya, prinsip-prinsip dasar Trias Politika telah diakomodasi dan diimplementasikan melalui berbagai mekanisme konstitusional dan kelembagaan. Perkembangan ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Implementasi Trias Politika di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kompleksitas. Salah satu tantangan utama adalah potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan dan konflik kepentingan. Misalnya, intervensi eksekutif terhadap legislatif atau sebaliknya dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan yang ideal, sementara ketidakjelasan batas antara eksekutif dan legislatif dapat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dinamika politik yang kompleks, termasuk polarisasi politik dan pengaruh partai politik, dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas lembaga-lembaga negara. Dominasi partai politik tertentu dalam proses pengambilan keputusan di legislatif, misalnya, dapat mengurangi keberagaman pendapat dan menghambat representasi kepentingan

yang lebih luas. Begitu pula, lembaga yudikatif sering kali menghadapi tekanan politik yang dapat mempengaruhi proses peradilan dan integritas putusan hukum.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya-upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat implementasi Trias Politika di Indonesia. Penguatan koordinasi antar lembaga negara, melalui pembentukan forum dialog dan mekanisme konsultasi yang efektif, dapat membantu mengurangi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan sinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Reformasi hukum yang lebih tegas dan komprehensif juga diperlukan untuk memperjelas batas-batas kewenangan antar lembaga dan memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi. Pengembangan lebih lanjut implementasi Trias Politika harus fokus pada penguatan independensi lembaga negara, terutama lembaga yudikatif, agar dapat menjalankan fungsi peradilan secara adil dan imparial. Lebih dari itu, upaya-upaya ini harus didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat sipil, pejabat pemerintah, dan partai politik untuk menumbuhkan lingkungan politik yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga negara. Dengan demikian, Trias Politika dapat berfungsi secara efektif sebagai landasan bagi pemerintahan yang demokratis, adil, dan makmur di Indonesia.

5.1.2 Rekomendasi untuk Peningkatan Sistem Pemerintahan Indonesia di Masa Depan

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan Indonesia yang lebih baik di masa depan, diperlukan serangkaian langkah strategis yang saling berkesinambungan. Reformasi birokrasi dan desentralisasi menjadi fondasi utama. Penyederhanaan prosedur dan regulasi akan mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, sementara peningkatan kapasitas pemerintah daerah akan mengatasi ketimpangan antar wilayah dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran. Langkah ini harus diiringi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan. Penguatan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional akan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, sementara partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil.

Di era digital, pemanfaatan teknologi menjadi keharusan. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, sekaligus memodernisasi pengelolaan pemerintahan. Kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang pesat juga krusial agar sistem pemerintahan tetap relevan dan efisien. Di sisi lain, reformasi politik yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Evaluasi proses pemilu dan reformasi undang-undang terkait akan menghasilkan partai politik yang lebih berkualitas dan proses demokrasi yang lebih matang, sehingga menghasilkan pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, penguatan lembaga penegak hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi, adalah kunci utama. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam memberantas korupsi akan menciptakan sinergi yang kuat dan efektif. Dengan implementasi berkelanjutan dari langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Resmi

- Aristokrasi. *Ensiklopedia Politik P2K Stekom*, dari <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Aristokrasi>. diakses 30 April 2025.
- Badan Legislasi DPR RI. *Evaluasi Pelaksanaan Prolegnas 2023* (Jakarta: DPR RI, 2023). <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Baleg-atas-Evaluasi-Program-Legislati-Nasional-Tahun-2023-dalam-Rapat-Paripurna-DPR-RI-1693296978.pdf>. diakses 1 Mei 2025
- Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Rencana Strategis Direktorat PSMEETTI Tahun 2020-2024*, 2024, dokumen resmi yang ditandatangani secara elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), dari https://www.bsn.go.id/uploads/download/signed_renstra_2020-2024_dit_ps_meetti_final_review_meetti_12_04_2021.pdf. diakses pada 1 Mei 2025.
- DKJN, “Sidang Lanjutan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Presiden Republik Indonesia dengan DPR dan BPK”, 18 April 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Pembagian,” dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses 30 April 2025.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Tahunan 2024: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Jakarta: KPK, (2024).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017). dari https://mpr.go.id/img/jurnal/file/250322_2017%20%20Checks%20&%20Balances%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20Indonesia.PDF. diakses 30 April 2025.
- Partnership for Governance Reform. *Membangun Pemerintahan Presidensial yang Efektif Melalui Desain Sistem Pemilihan Umum* (Jakarta: Partnership for Governance Reform, 2011). dari <https://media.neliti.com/media/publications/45240-ID-membangun-pemerintahan-presidensial-yang-efektif-melalui-desain-sistem-pemilihan.pdf>. diakses 1 Mei 2025.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 1, 18 Agustus 1945. dari <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>. diakses 30 April 2025.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). “Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat,” MetroTVNews, 21 Februari 2024. dari <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C3aBq-dinasti-politik-dan-nepotisme-jokowi-bertentangan-dengan-kedaulatan-rakyat>. diakses 29 April 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 dan Pasal 2; Firmanzah, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2015).

Wibowo, Mardian. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Depok: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018). dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_30_MK%20Dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20RI.pdf. diakses 30 April 2025.

Buku-Buku

Armawan, S.H., M.H. *Distribusi Kekuasaan (Distribution of Power) dan Implikasinya pada Administrasi Kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

_____, Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Aulina, Nissa. *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*, ed. Asep Iwan Setiawan, edisi pertama. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNI Sunan Gunung Djati, 2022.

Baghi, Silvano Keo. *Negara Bukan-Bukan?*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.

Bahri, Idik Saeful. *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, cetakan 1. Jawa Barat: Bundaran Hukum, 2021.

Bodin, Jean. *The Six Books of the Commonwealth*, terj. Julian H. Franklin. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Gramedia: Jakarta, 2008.

Carias, Brewer dalam Efik Yusdiansyah. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, 2010.

- Fahamsyah, C.L.A. Ermanto. *Hukum Tata Negara*, edisi pertama. Bandung: INFES MEDIA, 2023.
- Friedrich, Carl J. dan Brzezinski, Zbigniew K. *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, trans. William Rehg. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
- Kansil, C.S.T. Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Ledalero, 2013.
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Murtiningsih, Wahyu. *Para Filsuf dari Plato sampai Ibnu Bajjjah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- Mutawalli, Muhammad. *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023.
- Nasution, Anwar. "The Government Decentralization Program in Indonesia," dalam Naoyuki Yoshino & Peter J. Morgan (ed.), *Central and Local Government Relations in Asia: Achieving Fiscal Sustainability*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017.
- Power, Thomas dan Warburton, Eve. *Demokrasi dari Stagnasi ke Regresi?* Jakarta: PT Gramedia, 2021.
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Shklar, Judith N. *Montesquieu: Penggagas Trias Politika*, diterjemahkan oleh Angelina S. Maran. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996.
- Untara, Simon, and Datu Hendrawan, *Bonum Commune Dalam Filsafat Barat*. Surabaya: PT Kanisius, 2017.

- Skinner, Quentin. *The Foundations of Modern Political Thought: The Age of Reformation* (. 2). Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- Slamet, Effendy Yusuf dan Basalim, Umar. *Reformasi Konstitusi Indonesia: Perubahan Pertama UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.
- Suhaimi, Ahmad dan Hasibuan, Pagar. *Geliat Neo-Komunisme Di Indonesia (Penopang Gelap Gerbong Reformasi)*, cetakan pertama. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT Gramedia, 2007.
- Sulisworo, Dwi. Wahyuningsih, Tri dan Dikdik Baegaqi Arif. *Demokrasi: Bahan Ajar*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- Suseno, Frans Magnis. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1998.
- _____. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia, 1998.

Jurnal

- Akbar, Rivan Pahreji Affan, Muhammad Yangyang Sihabudin, Riko elvan Firdaus, “Perkembangan Demokrasi Di Indonesia,” *Perspektif* 5, no. 3. 2000.
- Alrah, Zikraini. “Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau,” *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1, no. 1. September 2019. dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/paradigma/article/download/27289/10647>. diakses 30 April 2025.
- Amalia, Dyah Silvana. “Sengketa Kewenangan Antara Presiden Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perkara Divestasi PT. New Mount,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)* 1, no. 1. 2022.
- Amiliya, D, Anggreni, Fuadi, A. dan F. Fitriyani, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 4, no. 2. 2024.
- Andriyan, Dody Nur. “Format Kabinet Presidensial Dalam Tata Hubungan Pengelolaan Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Jentera* 3, no. 1. 2020.
- Anugerah, Boy et al. “Reorientasi Identitas Demokrasi Di Era Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi* 34. 2018.
- Arif, Mhd. Fakhrurrahman dan Qomariah, Siti. “Prosedur Pembentukan Undang-Undang di Indonesia sebagai Negara Hukum,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 1, Juli 2023.

- Azed, Abdul Bari. "Mewujudkan Sistem Presidensial Murni di Indonesia: Sebuah Gagasan Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Legalitas* 5, no. 2. Desember 2013.
- Bari, Abdul. Taufik Achmad. Wardani, Win Yuli. Purwandi, Agustr. Kasanova, Ria. "Reformasi Hukum Pemilu: Meningkatkan Integritas, Partisipasi, dan Kepastian Hukum dalam Proses Demokrasi," *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1. Juni 2024.
- Basri, Abdul Rahman et al. "Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi-Presidensial," *Journal of Governance and Local Politics* 6, no. 1, 2024.
- Budiman, Muslimin. "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1. 2017. <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i1.5>.
- Bukido, Rosdalina. "Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Prakteknya Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 1. 2012. <https://doi.org/10.30984/as.v10i1.157>.
- Crespo, et al., "E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, 2022.
- D dan S. T. Maulia, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 10, 2024.
- Decapriu et al. "Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Checks and Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat," *Wijaya Putra Law* 2, no. 2, 2023.
- Dwi, Lestari. "Inovasi Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2, 2024.
- Ernawan, Ade Cahya Dwi et al. "Memelihara Stabilitas Dan Keadilan Melalui Keseimbangan Kekuasaan Dalam Kerangka Hukum Tata Negara," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3, 2024.
- Fikri Wahyudin, Riva Aryani Purwana, dan Syifa Masrihah. "Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2, 2019.
- Firdaus, Arief et al. "Demokrasi Indonesia Gagasan Pendiri Bangsa: Demokrasi Berdasarkan Pancasila," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6, 2024.
- Firdaus, Inas Tasya. "Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles," *Jurnal Kybernan* 7, no. 1, 2022.

- Gibran, Dimas and Utomo, Satrio. "Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1, 2025.
- Hadi, Syofyan. "The Influence of Theorie Von Stufenbau Der Rechtsordnung in the Indonesian Legal System," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 20, 2024. dari <https://doi.org/10.30996/dih.v20i2.10989>. diakses 7 Februari 2025.
- Hau Wele, Yabes Abraham, Monteiro, Yosef Mario dan Tupen, Rafael Rape. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3, 2024.
- Hidayat, Arief. "Independensi Peradilan dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Demokrasi* 10, no. 2, 2022.
- Indrati, Maria Farida. "Peran Tafsir Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019.
- Jailani, Sofyan. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3, 2015. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.360>.
- Juliyanto, Agus. "Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau," *Serambi Akademika*. 6, no. 2, November 2018.
- Justitia, Res. "Korupsi dan Dampaknya terhadap Sistem Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan* 12, no. 3, 2023.
- Kurniawan, Ridha. "Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD," *Jurnal Yuridis Unaja Universitas Adiwang* 1, no. 1, 2018.
- Lailam, Tanto. "Problem Dan Solusi Penataan *Checks and balances* System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The *Checks and balances* System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 1, 2021.
- Lawani, Adelia Fernanda. Pondang, Audi. Lumintang, Delasnova. "Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," *Lex Administratum* 9, no. 2, 2021.
- Maggara, T. S, Adnan, M. F. dan Khaidir, A. "Penerapan Prinsip-Prinsip Governance di Negara Maju dan Berkembang: Pelajaran dan Best Practices," *Stratēgo: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 6, no. 3, 2024.
- Mamahit, Angel J. S. "Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945," *Lex Administratum* 2, no. 2, April 2014.

- Mannan, Faidhul et al. "Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 2, 2024.
- Maritza, Dhiya Fahriyyah and Taufiqurokhman. "Peranan Masyarakat Sipil Dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik Yang Aktif," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 14, no. 1, 2024.
- Mawardi, Chalik and Akhdloriy, Abdurrahman Al Al. "Tantangan Modern Dalam Menjaga Integritas Hakim: Mengatasi Ancaman Terhadap Keluhuran Martabat Profesional," *Jatijajar Law Review* 3, no. 1, 2024.
- Montesquieu. *De l'esprit des lois* (1748), "Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice," dikutip dari *La Toupie*, 2024. dari <https://www.toupie.org/Citations/Montesquieu.htm>. diakses 15 April 2025.
- Muhtada, Dani dan Diniyanto, Ayon. "Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen," *Jurnal Pandecta* 15, no. 2, 2024.
- Naibaho, Rinsofat dan Hasibuan, Indra Jaya M. "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 2, Juli 2021.
- Namang, Raimundus Bulet. "Negara dan Warga Negara dalam Perspektif Aristoteles". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4 No. 2, 2020.
- Nasution, Aziz Fahri Prawira. and Nasution, Tomi Mandala Putra. "Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensia di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2, 2022.
- Nega, Arsenius. "Demokrasi: Antara Cita dan Realita," *Jurnal Akademika* 12, no. 2, 2024.
- Octovina. "Sistem Presidensial di Indonesia," *CosmoGov*, Jurnal Universitas Padjadjaran, 2023. dari <https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/17065>. diakses 30 April 2025.
- Paizon Hakiki. "Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, no. 1, 2020.
- Palenewen, Jovano Deivid Oleyver and Yanur, Murniyati. "Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi," *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 9, no. 2, 2022.
- Pangaribuan, Refo Rifaldo, Palilingan, Toar Neman, dan Wewengkang, Feiby. "Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," *Lex Administratum* 12, no. 5, 2023.

- Paramarta. "Hubungan Antara Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2, 2024.
- Polamolo, Susanto. "Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan," *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013.
- Putra, Rizky. "Penguatan Sistem Checks and Balances untuk Mencegah Korupsi dan Nepotisme," *Jurnal Widyakarya* 8, no. 1, 2023.
- Rachman, Irfan Nur. "Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2, 2016.
- Rannie, Mahesa. "Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945," *Jurnal Simbur Cahaya* 3, no. 2, 2021.
- Rasji, Michellena dan Syamila, Najma. "Penerapan Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 10, no. 01, Mei 2024.
- Rawung, Nixon Lowing Sergio dan Palilingan, Toar Neman. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 1, 2011.
- Roring, Edward Benedictus et al. "Perbandingan Sistem Ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi terhadap Stabilitas Politik Nasional," *Jurnal Communitarian* 6, no. 1, 2024.
- Ruhenda et al. "Tinjauan Trias Politika terhadap terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia," *Journal of Governance and Social Policy*. 1, no. 2 (2020)., dari <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>. diakses 20 Februari 2025.
- S Afifah and C Suhardiman. "Hubungan Antara Kekuasaan Eksekutif Dan Yudikatif Dalam Konteks Politik Hukum di Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 2, 2024.
- Samuel, Yakub et al. "Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020," *Milthreelaw Journal* 1, no. 2, 2024.
- Santoso, D. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal PKN* 7, no. 2, 2023.
- Sardini, I. Nurdin, N. H dan J. Oktaviani. "The Origins of Indonesian Democracy and Its Implications in Indonesian Politics," *Archives of Business Research* 11, no. 5, 2023. dari <https://doi.org/10.14738/abr.115.14703>; diakses 7 Februari 2025.

- Sari, Adena Fitri Puspita and Raharjo, Purwono Sungkono. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," *Sovereignty* 1, no. 4, 2022.
- Setio Budi, Mohammad Wahyu Adji. "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments," *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 1, 2022. dari <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>. diakses 7 Februari 2025.
- Sigalingging, Angelius Henry dan Warjio. "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2, Desember 2014
- Sihombing, R. F. "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan," *Repository UHN*, dari <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3317?show=full>. diakses 30 April 2025.
- Solihah, Ratnia. "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1, 2018.
- Sulaiman, Badri Hasan. "Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Penyelenggaraan Otsus di Daerah," *Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin* 3, no. 2, Agustus 2020. dari <https://journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/download/91/107> diakses 30 April 2025.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4, 2012.
- Sumarandak, Widya Christie. "Kewenangan Presiden RI di Bidang Legislatif Setelah Perubahan UUD NRI 1945," *Lex Administratum* VI, no. 4, 2018.
- Sunardi, Sunardi. "Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Meta Yuridis* 1, no. 2, 2018.
- Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2, 2016.
- Suryanata, Redani dan Mubarrak, Muhammad Zaki. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum," *UNES Law Review* 6, no. 4, 2024.
- Susanto, Nur Agus. "The Constitutional 'Tyrant'" 6, no. 49, 2013.
- Sutiyoso, Bambang. "Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2, 2011.

- Syadid, Ahmad Qaulan and Yanuardi. “Efektivitas Pemerintahan Parlementer Presidensial di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 4, 2024.
- Syahrul, A. “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Good Governance Melalui Judicial Review Terhadap Undang-undang,” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 2, no. 1, 2015.
- Syamsudin. “Praktik Check and Balance dalam Ketatanegaraan di Indonesia antara Legislatif dan Eksekutif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020),” *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan* 4, 2024.
- Talli, Bdul Halim. “Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 1, Juni 2014.
- Tomy, Michael. “Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang Kehendak Umum dan Partisipasi Rakyat,” *Jurnal Pemikiran Politik dan Demokrasi* 10, no. 2, 2023.
- Umardani, Achmad. “Pengaruh Tirani Terhadap Pemikiran Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur),” *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1, 2019.
- Waluyo, Bambang. “Fenomena Kekuasaan Ke Arah Constitutional Heavy,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4, Desember 2012.
- Wardhana, Arief Wisnu. “Hubungan Presiden Dan Lembaga-Lembaga Negara,” *Jurnal Varia Hukum* 3, no. 39, 2018.
<https://doi.org/10.32502/jvh.v30i39.1470>.
- Wardoyo, Jonathan Haamashea. “Pendelegasian Wewenang Pembentukan Peraturan Kepada Menteri” 1, no. 8, 2014.
- Wibisono, Yusuf. “Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Proses Demokratisasi Di Tingkat Lokal,” *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 40, no. 56, 2017.
- Wibowo, Ghiyats Amri et al. “Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia,” *Media of Law and Sharia* 5, no. 3, 2024. dari <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.102>. diakses 20 Maret 2025.
- Wulandari, Jahra Delia et al. “Pengaruh Hubungan Antar Lembaga Negara Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia 2024 Madani: *Jurnal Ilmiah Multidiscipline*” 2, no. 11, 2024.
- Yamin, M. “Delegasi Wewenang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2, 2019.

Yurijaya. "Peran DPR dalam Kebijakan Pemerintah tentang Pengawasan," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi September 2022.

Yusmiati. "Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1, 2020.

Zaenal, Arifin. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Pro Hukum* 18, no. 1, 2023.

Zainal, Arifin. "Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Fungsi Legislasi," *Jurnal MPP (Majalah Politik dan Pemerintahan)* Universitas Padjadjaran 6, no. 1, 2020.

Zenal, Setiawan. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Stabilitas Hukum di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 2, 2024.
(Tempatpenampung1)<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/843/Sidang-Lanjutan-Sengketa-Kewenangan-Lembaga-Negara-Antara-Presiden-Republik-Indonesia-dengan-DPR-dan-BPK.html>.

Media Online

"Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Hukumonline*, diakses 30 April 2025, dari <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4973d01fb73000fcea1215/prinsip-checks-and-balances-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/>.

"Sengketa Informasi: BPK dan DPR Terancam Sanksi Pidana dan Denda," *Pattiro*, 31 Mei 2023. <https://pattiro.org/2014/02/sengketa-informasi-bpk-dan-dpr-terancam-sanksi-pidana-dan-denda-ki-pusat-akan-periksa-bpk-terkait-hambalang/>. diakses 30 April 2025.

Adiputro, Arif. (lihat: Indonesian Parliamentary Center, "Evaluasi Kinerja DPR 2019-2024," 30 September 2024. dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/evaluasi-kinerja-dpr-2019-2024--ipc-catat-dampak-konfigurasi-koalisi-oposisi-terhadap-fungsi-dpr-lt66fb3f2f3451d/>). diakses 30 April 2025.

Apa Itu Monarki? Pengertian, Sejarah, Jenis, dan Negara yang Menggunakannya," *Fahum UMSU*, 20 Januari 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-monarki-pengertian-sejarah-jenis-dan-negara-yang-menggunakannya/>. diakses 30 April 2025.

Aristokrasi. "Pengertian dan Sejarah Singkatnya" *Kumparan*, 2 Maret 2024. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/aristokrasi-pengertian-dan-sejarah-singkatnya-22GQDklitvp>. diakses 30 April 2025.

Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 12 Oktober 2023. dari <https://setkab.go.id/bagaimana-membuat-perencanaan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/>. diakses 30 April 2025.

- CNN Indonesia, “Mengapa Diktator Nazi Adolf Hitler Membantai Jutaan Orang Yahudi?,” 8 Januari 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240108163216-134-1046837/mengapa-diktator-nazi-adolf-hitler-membantai-jutaan-orang-yahudi>; diakses 30 April 2025.
- Fahum UMSU, “Perbedaan 3 Sistem Pemerintahan Indonesia: Parlementer, Presidensial, dan Semi-Presidensial,” 25 September 2024. dari <https://fahum.umsu.ac.id/blog/perbedaan-3-sistem-pemerintahan-indonesia-parlementer-presidensial-dan-semi-presidensial/>.diakses 30 April 2025.
- Farhan, Muhammad. “Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi,” *IAP2 Indonesia*, (29 Desember 2021). dari <https://iap2.or.id/partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi/>. diakses 30 April 2025.
- Fibrianti, Silvia. “5 Tahapan Pembentukan Undang-Undang Oleh,” Biro Hukum, dari https://jdih.komdigi.go.id/artikel_hukum/artikel-hukum/unduh/72. diakses 30 April 2025.
- Firosya, Baladan Hadza. “Wewenang Mahkamah Agung Beserta Tugas dan Fungsinya”, Detik, 8 Oktober 2023. dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6970595/wewenang-mahkamah-agung-beserta-tugas-dan-fungsi>. diakses pada 8 Februari 2025.
- Handi, Imam. “Sebatas Tukang Stempel”, Tempo, 7 Januari 2023. dari <https://www.tempo.co/arsip/lemah-pengawasan-dpr-terhadap-pemerintah-829037>. diakses pada 7 Februari 2025.
- Hukumonline. “15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum,” dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7f9e6d6f1a3/15-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/>. diakses 30 April 2025.
- _____. “Evolusi Sistem Pemerintahan Indonesia: Dari Masa ke Masa”, 12 Agustus 2024. dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/evolusi-sistem-pemerintahan-indonesia-dari-masa-ke-masa/>. diakses pada 20 April 2025.
- _____. “Hakim Agung Kamar Pidana Beberkan 3 Tantangan Independensi Hakim”, 2 Juni 2022. dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-agung-kamar-pidana-beberkan-3-tantangan-independensi-hakim-lt6298313bc46eb/>. diakses pada 15 April 2025.
- _____. “Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia,” 16 Juni 2023. dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/>. diakses pada pada pada 30 April 2025.

_____. “Presiden Bersengketa dengan DPR dan BPK,” Hukumonline.com, 2012. dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-bersengketa-dengan-dpr-dan-bpk-lt4f43922a4d8d5/>. diakses 10 Februari 2025.

Kepri Pos. “Nepotisme dan Korupsi: Ancaman Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan,” 15 Maret 2025. dari <https://kepripos.id/nepotisme-korupsi-akuntabilitas>. diakses 30 April 2025.

Kompas. “Mengenal DPA, Lembaga Tinggi Negara yang Dihapus di UUD tapi Mau Dihidupkan,” 12 Juli 2024. dari <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/12/070000165/mengenal-dpa-lembaga-tinggi-negara-yang-dihapus-di-uud-tapi-mau-dihidupkan?page=all>. diakses 30 April 2025.

_____. “Bagaimana Sistem Pemerintahan di Amerika Serikat?”, 2 November 2021. dari <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/02/053654770/bagaimana-sistem-pemerintahan-di-amerika-serikat?page=all>. diakses 30 April 2025.

_____. “Sistem Presidensial, Sistem Pemerintah di Indonesia,” *Kompas*, 5 Februari 2020. dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/05/160000869/sistem-presidensial-sistem-pemerintah-di-indonesia>. diakses 30 April 2025.

_____. “Tantangan Disfungsi Pengawasan Komisi Yudisial,” 17 Juli 2023. dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/17/tantangan-disfungsi-pengawasan-komisi-yudisial>. diakses 30 April 2025.

Luthfia, Allisa. “Perbedaan Peran dan Fungsi MPR-DPR dalam Sistem Legislatif Indonesia”, 6 Oktober 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4379798/perbedaan-peran-dan-fungsi-mpr-dpr-dalam-sistem-legislatif-indonesia>. diakses 7 Februari 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Hakim Konstitusi Akil Mochtar: UUD 1945 Sebelum Amandemen Memiliki Banyak Kelemahan,” berita resmi, 23 April 2012. dari <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=Hakim+Konstitusi+Akil+Mochtar%3A+UUD+1945+Sebelum+Am+andemen+Memiliki+Banyak+Kelemahan%E2%80%9D%2C+23+April+2012>. diakses 8 Februari 2025,

_____. “ICCIS Bahas Pentingnya Prinsip Independensi Lembaga Peradilan Konstitusi”, 10 Agustus 2023. dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19428&menu=2>. diakses pada 7 Februari 2025.

_____. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2023; Kompas.com, “MK Buka Peluang Calon Presiden di Bawah 40 Tahun dengan Syarat Pengalaman Kepala Daerah,” 15 Maret 2025.
<https://www.kompas.com/pemilu2024/read/2025/03/15/mk-buka-peluang-calon-presiden-di-bawah-40-tahun>. diakses 10 Februari 2025.

MD, Moh. Mahfud. “Hukum Konstitusi di Indonesia Perspektif Mahfud MD,” *EduJavare*, 2024. dari
<https://edujavare.com/index.php/TLS/article/download/229/186/1010>. diakses 30 April 2025.

_____. “Konstitusi Adalah Pedoman Dasar Penyelenggaraan Negara,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 13 Juni 2023. dari
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8262>. diakses 30 April 2025.

Nandito, Putra. “Riset IPC: DPR periode 2019-2024 Gagal Jalankan Fungsi Pengawasan”, *Tempo* (30 September 2024). dari
<https://www.tempo.co/politik/riset-ipc-dpr-periode-2019-2024-gagal-jalankan-fungsi-pengawasan-4133>. diakses pada 7 Februari 2025.

Nisa, Amirul. “Apa Perbedaan Monarki dan Republik? Ini Perbedaan 2 Bentuk Pemerintahan di Dunia”, 6 Oktober 2022.
<https://bobo.grid.id/read/083513000/apa-perbedaan-monarki-dan-republik-ini-perbedaan-2-bentuk-pemerintahan-di-dunia?page=all>. diakses 30 April 2025.

Nugroho, Eryanto. “Menghadapi Proses Legislasi yang Dystopian”, 21 Oktober 2020. dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menghadapi-proses-legislasi-yang-dystopian-lt5f8feec85fd45/>. diakses pada 7 Februari 2025.

Pegadangan Desa. “Teori Kontrak Sosial Rousseau: Asas Pemerintahan yang Adil dan Penuh Partisipasi,” dari <https://pegadangan.desa.id/teori-kontrak-sosial-rousseau-asas-pemerintahan-yang-adil-dan-penuh-partisipasi>. diakses 30 April 2025.

Politik Kolusi dan Nepotisme, *Kompas.id*, 6 November 2023.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/06/politik-kolusi-dan-nepotisme>. diakses 29 April 2025

PosKota. “Isi Lengkap Video Peringatan Darurat yang Viral, dari Najwa Shihab hingga Pandji Pragiwaksono Ikut Unggah”, Rabu 21 Agustus 2024. dari <https://www.poskota.co.id/2024/08/21/isi-lengkap-video-peringatan-darurat-yang-viral-dari-najwa-shihab-hingga-pandji-pragiwaksono-ikut-unggah>. diakses pada 7 Januari 2025.

- Prasetyo, Arif Bagus. "Katakan Tidak pada Kediktatoran," Kompas, 19 November 2019. dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/11/19/katakan-tidak-pada-kediktatoran>. diakses pada 20 April 2025.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (2014): 1-36. dari <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/SENGKETA-KEWENANGAN-ANTAR-LEMBAGA-NEGARA.pdf>. diakses 1 Mei 2025.
- Tirani. Pengertian dan Contohnya," *Kumparan.com*, 24 Agustus 2024. dari <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/tirani-pengertian-dan-contohnya-230ErcMfLOv>. diakses 30 April 2025.
- Utama, Virdika Rizky. "Duapuluh Tahun Setelah Rezim Suharto: Politik Dinasti dan Tanda-tanda Otoritarianisme Subnasional," *Kyoto Review of Southeast Asia*, (12 Juli 2018). dari <https://kyotoreview.org/issue-27/duapuluh-tahun-setelah-rezim-suharto-politik-dinasti-dan-tanda-tanda-otoritarianisme-subnasional/>. diakses 30 April 2025.
- Zoelva, Hamdan. "Revisi UU MK Dinilai Ancam Independensi Lembaga Peradilan," *VOA Indonesia*, 16 Mei 2024. dari <https://www.voaindonesia.com/a/revisi-uu-mk-dinilai-ancam-independensi-lembaga-peradilan/7614809.html>. diakses 29 April 2025,

Tesis/Makalah

- Hudi, Mohamad. *Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)*, tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Silaban, Muh Rizky. "Pemikiran Filsafat Politik Abad Modern (Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau)," makalah, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2021. dari https://www.academia.edu/44987769/Pemikiran_Filsafat_Politik_Abad_Modern. diakses 20 Oktober 2025.
- Übermensch. Konsep Aristokrasi: "Yaitu Mengatakan Ya. Arti dari Mengatakan Ya Ini adalah Mengafirmasi Kehidupan." Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 2009.